

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Dara Anindya Pratiwi
NPM : 1905170281
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66214807 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DARA ANINDYA PRATIWI
N P M : 1905170281
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., S.S., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

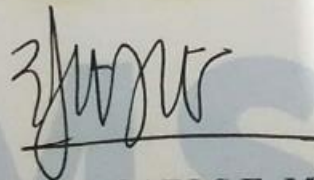
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DARA ANINDYA PRATIWI
N P M : 1905170281
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

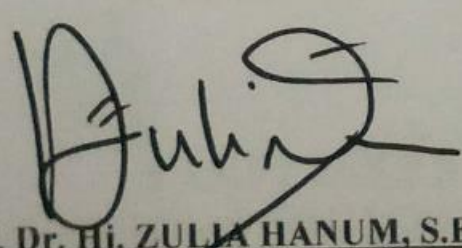


Dr. EKA NURMALA SARI S.E., M.Si., Ak., CA



Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: DARA ANINDYA PRATIWI
N P M	: 1905170281
Dosen Pembimbing	: Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA
Program Studi	: AKUNTANSI
Konsentrasi	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian	: PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	perubahan tabel - tabel, diperbaiki, uji validasi & reliabilitas	11/8 23	3/
Bab 4	buat tingkat pengembalian kelesan, perbaikan tanggapan responden. dan buat dengan ME: perbaikan dan lebih lengkap	11/8 23	3/
Bab 5	kesimpulan perbaikan, sama has opname	11/8 23	3/
Daftar Pustaka	Maeri dosen Ah 5 mm	11/8 23	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Agustus 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

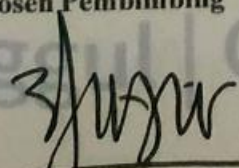
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

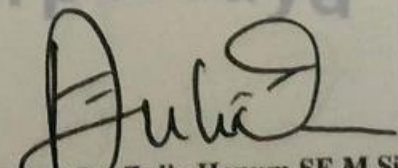
Nama Mahasiswa : DARA ANINDYA PRATIWI
N P M : 1905170281
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	Kerangka konseptual tabel arsitek & menu di sektor publik. Varsel	12/8 23	3/f
Bab 3	uji validasi & kelayakan ber arsitek.	12/8 23	3/f
Bab 4	langkah kerja di kot publik pada kategori, perubahan di kelas di kelas.	12/8 23	2/f
Bab 5	konsep di publik, syarat syarat karen sesuai dengan hasil pemeliharaan data	12/8 23	3/f
Daftar Pustaka	8/128 5 arsitek dari 18.	12/8 23	2/f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Agustus 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DARA ANINDYA PRATIWI
N P M : 1905170281
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	Saran di publikasi.	21/8/23	
Daftar Pustaka	1 spasi.	21/8/23	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Skripsi lanjut ke sidang	24/8/23	

Medan, Agustus 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DARA ANINDYA PRATIWI

NPM : 1905170281

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kota Medan" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

DARA ANINDYA PRATIWI

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA MEDAN

Dara Anindya Pratiwi

Program Studi Akuntansi

Email : daraanindyapратиwi@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Kemudian, pemerintah kota medan selama berturut-turut 2 tahun terakhir telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas penyajian laporan keuangannya, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pos-pos penyajian laporan keuangan tersebut, diantaranya: pada Penyusunan Laporan Keuangan masih adanya Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat. Pada Aset terdapat Penatausahaan Persediaan yang Belum Tertib. Pada Pendapatan masih terdapat Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib, dan Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan. Pada Belanja terdapat Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal, Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa, Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengelolaan Dana BOS belum Memadai. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya manusia di Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemudian dengan terdapatnya beberapa permasalahan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam pengendalian intern di Pemerintah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan model *non probability sampling* atau *sampling jenuh* yaitu penyebaran kuesioner kepada bagian keuangan berjumlah 40 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan metode *SEM-PLS (Partial Least Square)* dengan menggunakan *software SmartPLS*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.

Kata kunci: *Standar Akuntansi Pemerintah, SAP, Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan, SEM-PLS, SmarttPLS.*

ABSTRACT

EFFECT OF THE APPLICATION ON GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) AND INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS (OPD) IN MEDAN CITY

Dara Anindya Pratiwi

Accounting Study Program

Email : daraanindyapратиwi@gmail.com

The problem in this research is the increasing demands of society for good governance which has encouraged the central government and local governments to implement public accountability. Then, the Medan city government for the last 2 consecutive years has received an unqualified opinion on the presentation of its financial statements, but there are still several problems in the presentation of these financial statements, including: in the preparation of financial statements there is still a Classification of Personnel Expenditure Budgeting , Expenditure on Goods and Services, Expenditure on Social Assistance, Expenditure on Capital, and Expenditure on Other Financial Assistance in a number of Incorrect OPDs. In Assets there is Unorderly Inventory Administration. In Revenue there is still Management of Regional Taxes that are Not Orderly, and Management of Regional Levies that are Not Optimal and Not in Accordance with Provisions. In Expenditures, there is a shortage of volume for work packages for capital expenditure, a shortage in volume for work packages for goods and services, overpayment of salaries and benefits, inadequate management of BOS funds. From these data it shows that the weakness of human resources in the Medan City Government in implementing SAP in the process of preparing financial reports, then with the presence of several problems in managing Revenue and Expenditure accounts indicates that there are weaknesses in internal control in the Medan City Government. The purpose of this study was to test and analyze the effect of the application of Government Accounting Standards (SAP) and Internal Control on the quality of Medan City Government Financial Statements. This study uses quantitative research methods with an associative approach to research. The sampling technique uses a non-probability sampling model or saturated sampling, namely the distribution of questionnaires to the finance department with a total of 40 respondents. Data collection techniques using primary data. This study uses the SEM-PLS (Partial Least Square) method using SmartPLS software. This study shows that Government Accounting Standards (SAP) and Internal Control have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements of Regional Apparatus Organizations (OPD) in Medan City.

Keywords: Government Accounting Standards, SAP, Internal Control, Quality of Financial Reports, SEM-PLS, SmarttPLS.

KATA PENGANTAR

حَمْدٌ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kota Medan**”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Studi Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini dengan sukses dan lancar berkat bantuan, bimbingan serta peran dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Muhammad Ramadhan dan Ibu Misda Ariyani dan kepada nama-nama dibawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, petunjuk serta bantuan dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Rekan-rekan sesama mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga berjuan dalam menyelesaikan proposal.
10. Babon, Bojun, Kukumi, Minul, Patar, Bocil, serta Keluarga Besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata saya ucapkan semoga kiranya proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian penulis membutuhkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Agustus 2023

Penulis

Dara Anindya Pratiwi
NPM : 1905170281

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan	9
2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	13
2.1.3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)	16
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Konseptual	22
2.4. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Definisi Operasional	26
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4. Populasi dan Sampel	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Teknik Analisis Data	33
3.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	33
3.6.2. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
4.1. Deskripsi Data	37
4.1.1. Tingkat Pengembalian Angket	38
4.1.2. Identitas Responden	38
4.1.3. Analisis Variabel Penelitian	40
4.2. Analisis Data	47
4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	47
4.2.2. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	53
4.2.3. Uji Hipotesis	55
4.2.4. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Opini LKPD Kota Medan Tahun 2017-2021	3
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Table 3.1 Definisi Operasional.....	27
Table 3.2 Rincian Waktu Penelitian	28
Table 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian SKPD di Kota Medan	28
Table 3.4 Skala Likert	30
Table 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	31
Table 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X1).....	31
Table 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Pengendalian Intern (X2).....	32
Table 3.8 Hasil Uji Reabilitas	32
Table 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	38
Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Table 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
Table 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
Table 4.5 Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	40
Table 4.6 Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	41
Table 4.7 Deskripsi Jawaban Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan	43
Table 4.8 Deskripsi Jawaban Variabel Pengendalian Intern	46
Table 4.9 Outer Loading	48
Table 4.10 Cross Loading	51
Table 4.11 Construct Validity and Reliability	52
Table 4.12 Nilai R-Square.....	53
Table 4.13 F-Square	53
Table 4.14 Hasil Path Coefficient	54
Table 4.15 Hasil Uji Hipotesis	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 3.1 Model Struktural	36
Gambar 4.1 Diagram Kualitas Laporan Keuangan	41
Gambar 4.2 Diagram Standar Akuntansi Pemerintahan	44
Gambar 4.3 Diagram Pengendalian Intern	47
Gambar 4.4 Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi apakah telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah, yaitu bentuk upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Suwardjono (2005), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintahan harus bermanfaat bagi para pemakai, yaitu memiliki nilai

atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan laporan tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan laporan tersebut dapat dipahami oleh pemakai, termasuk didalamnya adalah masyarakat. Adapun komponen laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yang diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat diahami. Laporan keuangan secara teoritis digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun secara empiris laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan, yaitu diantaranya penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari BPK. BPK memberikan 4 macam opini yang terdiri dari : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberi opini (*disclaimer*). Opini tersebut mencerminkan kualitas suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, berjalannya fungsi pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007). Laporan keuangan yang berkualitas mendapatkan opini WTP dari BPK.

Table 1.1
Opini LKPD Kota Medan Tahun 2017-2021

Entitas Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Medan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : IHPD BPK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Medan pada tahun 2020 dan 2021 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Opini tersebut menandakan bahwa Kota Medan telah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka buat. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan suatu apresiasi terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Walaupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD untuk tahun 2020 dan 2021 sudah mendapatkan opini WTP, namun tetap masih ada beberapa temuan

dan rekomendasi dari BPK RI masih terdapatnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan LHP di Kota Medan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di kota Medan masih terdapatnya beberapa masalah yaitu: pada Penyusunan Laporan Keuangan masih adanya Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat. Pada Aset terdapat Penatausahaan Persediaan yang Belum Tertib. Pada Pendapatan masih terdapat Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib, dan Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan. Pada Belanja terdapat Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal, Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa, Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengelolaan Dana BOS belum Memadai. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya manusia di Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, kemudian dengan terdapatnya beberapa permasalahan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam pengendalian intern di Pemerintah Kota Medan.

Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik. Hal ini dikarenakan, penerapan SAP Nomor 71 dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh para instansi harus disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan, agar laporan tersebut berkualitas.

Menurut penelitian Maydiyanti, dkk (2020) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kusnadi, dkk (2022) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Sihite dan Holiawati (2017) tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah, spi dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun dalam penelitian Yuliani dan Agustini (2018) tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Fungsi pengendalian ini dilakukan oleh Kepala Daerah melalui sistem pengendalian intern. Menurut Jogiyanto (2007), dengan adanya pengendalian intern, diharapkan akan semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif produktivitas organisasional.

Penelitian Rangkuti, dkk (2022) tentang determinant analysis of the quality of local government financial reports with the government internal control system as moderating variables in the government mandailing district christmas, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Suratman, dkk (2022) tentang analisis sistem pengendalian intern, standar akuntansi, teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan basarnas dan Holle, dkk (2019) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada organisasi perangkat daerah provinsi papua), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tarigan dan Sari (2021) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerinahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan pada sejumlah OPD Tidak Tepat.
2. Lemahnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan.

3. Permasalahan pada akun Pendapatan dan Belanja menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam pengendalian intern.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

A. Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu akuntansi bagi peneliti khususnya mengenai pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan pemerintahan Kota Medan.

2. Bagi Instansi

Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern sebagai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahan Kota Medan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Fahmi (2013) mengemukakan bahwa : “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi bersifat finansial.

Kemudian Assauri (2015), mengemukakan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Adapun menurut Thomas (2013), menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah “laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang

memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (historis).”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi. Dalam laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan. Para akuntan memahami dengan benar bahwa laporan keuangan yang dibuat tersebut akan menjadi informasi keuangan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, seorang akuntan harus memahami dengan benar tujuan suatu pelaporan keuangan.

Dalam (Fahmi, 2013) Menurut PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, menjelaskan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Adapun menurut Nordiawan, dkk (2007) mengemukakan bahwa : “Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.1.1.3. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rudiyanto (2012) setiap perusahaan memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga rincian laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga berbeda. Namun, laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas yaitu : Dapat Dipahami, Relevan, Matrealitas, Keandalan/Reliabilitas, Substansi Mengungguli Bentuk, Pertimbangan Yang Sehat, Kelengkapan, Dapat Dibandingkan, Tepat Waktu, Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, karaktestik kualitatif merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan, Dapat Diperbandingkan.

Sedangkan menurut Pura (2013) karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa indikator standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu: Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan/Reliabilitas, Dapat Dibandingkan. Komparabilitas, Netral, Tepat Waktu, Lengkap.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa di dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunanya jika laporan keuangan yang disajikan tersebut mudah dipahami dan relevan atau bermanfaat bagi penggunanya. Selain itu, andal (informasi keuangan yang disajikan tidak hanya berguna untuk kebutuhan satu pihak saja akan tetapi untuk semua pihak), serta laporan keuangan antar periode dapat diperbandingkan sehingga dapat teridentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Maydiyanti, dkk (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian menurut Andi Kusnadi, dkk (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah yaitu: Kompetensi Aparatur Pemerintah, Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Keuangan Daerah.

Adapun menurut Agung, dkk (2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu: Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penelitiannya.

Selanjutnya menurut Yuliani dan Agustini (2018) dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan yaitu: Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Menurut Karsana dan Suaryana (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pada laporan keuangan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penulis mengambil Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern sebagai variabel independen dari penelitian ini.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.2.1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor,

judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah menurut para ahli.

Dalibas, dkk (2015, 8) menyatakan bahwa: “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Selanjutnya menurut Bastian (2011, 138) menjelaskan pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut : “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Hal senada dikatakan Siregar (2015, 72) bahwa: “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.1.2.2. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan jugaterwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Menurut Adhi, dkk (2013) tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Selanjutnya menurut Darise (2008, 39), “Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Adapun menurut Bastian (2011, 138) SAP bertujuan “Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan SAP adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.2.3. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Siregar (2015, 79), Tanjung (2015, 82), dan PP No 71 Tahun 2010, indikator standar akuntansi pemerintah yaitu : PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 Laporan Arus Kas, PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 5 Akuntansi Persediaan, PSAP 6 Akuntansi Investasi, PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 9 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.

Menurut Mursyidi (2013, 48) indikator standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut : Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*), Prinsip Perioditas, Prinsip Konsistensi, Prinsip Pengungkapan Lengkap, Prinsip Penyajian Wajar.

Berdasarkan uraian diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori menurut Siregar (2015), Tanjung (2015), dan PP No 71 Tahun 2010 yang menyatakan PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 3 Laporan Arus Kas, PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 5 Akuntansi Persediaan, PSAP 6 Akuntansi Investasi, PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 9 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi.

2.1.3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.1.3.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dari Treadway Commission dalam Susanto (2013, 95): “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku”.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian Intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dipengaruhi oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi berjalan secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan dari sistem pengendalian Intern menurut Hasanah, dkk (2016, 131) sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.

6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan Pelaporan Keuangan.
3. Pengamanan Aset Negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan”.

Adapun menurut Mulyadi (2010, 163) tujuan sistem pengendalian intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagimenjadi dua macam: pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang terkoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi yang mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administratif meliputi

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3.3. Indikator Sistem Pengendalian Intern

Menurut COSO dan Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2008 indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengaruh Sistem Pengendalian Intern sebagai acuan mengukur kualitas laporan keuangan pemerintahan sebagai berikut :

1. *A control environment* (lingkungan pengendalian)

Merupakan komponen terpenting karena membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Merupakan pengidentifikasian dan penganalisisan terhadap risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian tujuan entitas, yang akan membentuk dasar untuk membentuk dasar untuk menjabarkan bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. *Control activities* (kegiatan pengendalian)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan arahan-arahan dari pihak manajemen dipatuhi dan dilaksanakan.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Merupakan komponen yang menghubungkan komponen lainnya, sehingga semua komponen tersebut memiliki hubungan yang integral.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap gerak organisasi secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Model Analisi	Hasil Penelitian
1.	(Maydiyanti et al., 2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Independen: Standar akuntansi pemerintah (sap), sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), dan sistem pengendalian intern pemerintah (spip), teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia (sdm). Dependen: Kualitas laporan keuangan.	Analisi deskriptif Kualitas laporan keuangan.	Hasil pengujian hipotesis adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	(Agung & ., 2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	Independen : gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dependen : Kualitas laporan keuangan	pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
4.	(Karsana & Suaryana, 2017)	Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada	Independen : standar akuntansi keuangan, sumber daya manusia, dan sisitem	penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas,	Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Model Analisi	Hasil Penelitian
		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli	pengendalian intern. Dependen : Kualitas laporan keuangan	analisis regresi linier berganda.	manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.
5.	(Susanto et al., 2021)	Factors Affecting the Quality of Financial Reports in the Government of Langkat Regency	Independen : Government Accounting Standards (SAP), quality of human resources (HR), Government's Internal Control System (SPIP), information technology (IT), Regional Property Management (BMD). Dependen : Kualitas laporan keuangan	The research approach uses an associative approach, by using the purposive sampling method.	The results of this study indicate that The application of SAP affects the quality of financial reports, The quality of human resources affects the quality of financial reports, The application of SPIP affects the quality of financial reports, Mastery and utilization of IT affect the quality of financial statements, BMD management affects the quality of financial reports
6.	(Mahartini et al., 2021)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem	Independen : standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi Dependen : Kualitas laporan keuangan	metode <i>non-probability sampling</i> , analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	(Wahyuni et al., 2019)	The influence of the government's internal control system and the availability of budgets on the quality of financial statement (case study in local governments in North Sumatra)	Independen : Internal control system of government, dan availability of budget. Dependen : Quality of financial statement	using quantitative data analysis and The sampling technique used was saturated samples.	Based on the test results, the hypothesis in this study are as follows: The internal control system of government influence on the quality of financial statement. The availability of the budget does not have an effect on the quality of financial statement. Simultaneously, the system of internal control and the availability of government budget affect the quality of the financial report.

2.3. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu standar akuntansi dan pengendalian intern. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Mahsum, 2006, 42).

Kemudian, Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir asimetri informasi dengan cara *monitoring cost*. Sistem Pengendalian Intern dirancang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pengendalian intern akan mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan pengendalian intern yang baik maka akan dapat membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik maka diharapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan pihak pemerintahan setiap daerah, untuk melakukan segala upaya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern.

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Pemerintah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati, dkk, 2018).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi asimetri informasi dengan cara *bonding cost*, yang dapat mengurangi kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan SAP. Dengan demikian dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti, dkk (2020), Andi Kusnadi, dkk (2022), Susanto, dkk (2021), Karsana dan Suarana (2017), serta Sihite dan Holiawati (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

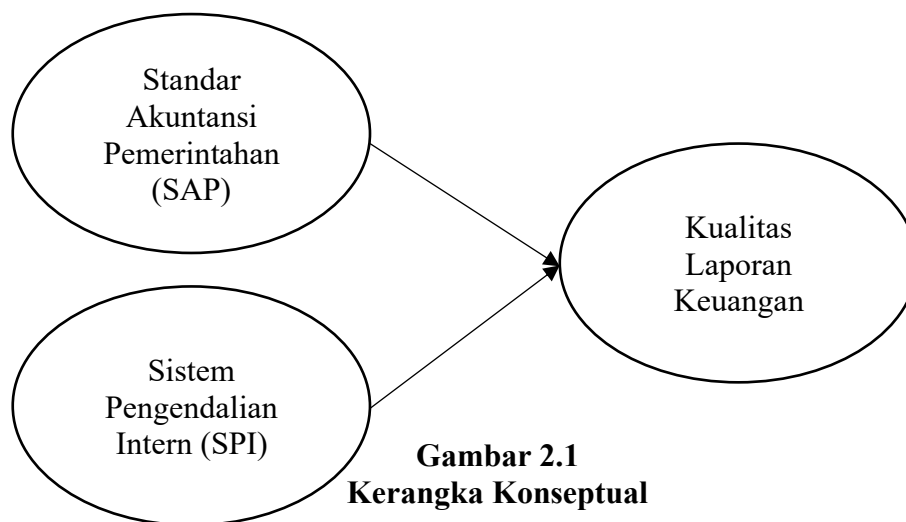
Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan

yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).

Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir asimetri informasi dengan cara *monitoring cost* dan dirancang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pengendalian intern akan mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan pengendalian intern yang baik maka akan dapat membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dkk (2019), Suratman, dkk (2022), Holle, dkk (2019), Maydiyanti, dkk (2020), dan Agung dan Gayatri (2018) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk kerangka berpikir sebagai berikut :



2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Martono, 2015). Berdasarkan kerangka konseptual, maka dapat ditarik hipotesis bahwa :

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.
2. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan asosiatif. Menurut Juliandi, dkk (2014) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat).

Penelitian ini relevan dengan metode kauntitatif dan pendekatan asosiatif, karena penelitian ini berfokus pada intrumen atau alat ukur, dan penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki pengaruh diantara dua atau lebih variabel.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman dimana dalam mengukur atau menguji suatu variabel sehingga dapat diekatui secara signifikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk memudahkan serta mengarahkan penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

Table 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen			
Kualitas Laporan Keuangan	Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat Dipahami 2. Relevan 3. Andal 4. Dapat Dibandingkan 	Ordinal
Variabel Independen			
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati, dkk 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan 5. Akuntansi Persediaan 6. Akuntansi Investasi 7. Akuntansi Aset Tetap 8. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 9. Akuntansi Kewajiban 10. Koreksi Kesalahan. 11. Laporan Keuangan Konsolidasi 	Ordinal
Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penaksiran Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan 	Ordinal

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbentuk Kedinasan pada Pemerintah Kota Medan, berjumlah 19 (sembilan belas) OPD.

B. Waktu Penelitian

Table 3.2
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																				
2	Pra Riset																																				
3	Penyusunan Proposal																																				
4	Bimbingan Proposal																																				
5	Seminar Proposal																																				
6	Riset																																				
7	Penulisan Skripsi																																				
8	Bimbingan Skripsi																																				
9	Sidang Meja Hijau																																				

3.4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan yang berbentuk Kedinasan yang tergabung pada Bagian Keuangan yang berjumlah 19 Dinas dikali 3 orang, sehingga populasi berjumlah 57 orang.

Table 3.3
Populasi dan Sampel Penelitian SKPD di Kota Medan

No.	Dinas
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
2.	Dinas Kesehatan Kota Medan
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
6.	Dinas Sosial Kota Medan
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Medan
8.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Medan
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No.	Dinas
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
13.	Dinas Perhubungan Kota Medan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah , Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
18.	Dinas Parawisata Kota Medan
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

Sumber : Badan Penelitian dan pengembangan kota Medan

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Penulis menggunakan model *non probability sampling* atau *sampling jenuh* yaitu penyebaran kuesioner kepada dua orang bagian keuangan di 19 (sembilan belas) kedinasan Kota Medan, dengan total 57 kuesioner yang dibagikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari tempat objek penelitian dilakukan. Tujuan dari teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai pengukuran terhadap variabel dimasa yang akan datang. Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Para pegawai atau responden diobjek penelitian yaitu: pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Medan yang hasilnya merupakan data tertulis yang didapat dari pegawai tanpa tekanan dari pihak lain

dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 (Lima) opsi, yaitu:

Table 3.4
Skala Likert

Pertanyaan	Bobot
- Sangat Baik	5
- Baik	4
- Cukup Baik	3
- Kurang Baik	2
- Tidak Baik	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan pada pegawai pemerintah kota medan sebanyak 30 orang.

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kemahiran suatu instrument pertanyaan sebagai alat ukur variabel penelitian Juliandi, et al. (2014). Berikut rumus menguji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara variabel (X) dan variabel (Y)

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum X$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum X^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum Y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum X)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Y)^2$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x y)$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Menurut Juliandi et al. (2014) uji signifikansi dilakukan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Dengan cara lain

yaitu dilihat dari nilai *sig* (*2 tailed*) dan membandingkan dengan taraf signifikan (α) yang ditentukan peneliti. Bila nilai *Sig* (*2 tailed*) $< 0,05$ maka butir instrumen valid, jika nilai *Sig* (*2 tailed*) $> 0,05$ maka butir instrumen tidak valid.

Table 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Item Pernyataan	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	R1	0,393 > 0,361	0,032 < 0,05	Valid
	R2	0,499 > 0,361	0,005 < 0,05	Valid
	DD1	0,442 > 0,361	0,014 < 0,05	Valid
	DD2	0,451 > 0,361	0,012 < 0,05	Valid
	ADL1	0,695 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	ADL2	0,622 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	DDH1	0,599 > 0,361	0,001 < 0,05	Valid
	DDH2	0,493 > 0,361	0,006 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Table 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X1)

Item Pernyataan	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Penerapan SAP (X1)	LK1	0,617 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	LK2	0,623 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	LRA1	0,504 > 0,361	0,004 < 0,05	Valid
	LRA2	0,570 > 0,361	0,001 < 0,05	Valid
	LAK1	0,463 > 0,361	0,010 < 0,05	Valid
	LAK2	0,367 > 0,361	0,033 < 0,05	Valid
	CaLK1	0,643 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	CaLK2	0,627 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	P11	0,692 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	P2	0,537 > 0,361	0,002 < 0,05	Valid
	I1	0,552 > 0,361	0,002 < 0,05	Valid
	I2	0,590 > 0,361	0,001 < 0,05	Valid
	AT1	0,386 > 0,361	0,035 < 0,05	Valid
	AT2	0,472 > 0,361	0,008 < 0,05	Valid
	AKP1	0,432 > 0,361	0,017 < 0,05	Valid
	AKP2	0,418 > 0,361	0,021 < 0,05	Valid
	AK1	0,462 > 0,361	0,010 < 0,05	Valid
	AK2	0,571 > 0,361	0,001 < 0,05	Valid
	KK1	0,508 > 0,361	0,004 < 0,05	Valid
	KK2	0,392 > 0,361	0,038 < 0,05	Valid
LKK1	0,475 > 0,361	0,008 < 0,05	Valid	
LKK2	0,540 > 0,361	0,002 < 0,05	Valid	

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Table 3.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Pengendalian Intern (X2)

Item Pernyataan	Nilai korelasi	Probabilitas	Keterangan	
Pengendalian Intern (X2)	LP1	0,508 > 0,361	0,004 < 0,05	Valid
	LP2	0,762 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	PR1	0,522 > 0,361	0,003 < 0,05	Valid
	PR2	0,700 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	KP1	0,502 > 0,361	0,005 < 0,05	Valid
	KP2	0,475 > 0,361	0,008 < 0,05	Valid
	IK1	0,522 > 0,361	0,003 < 0,05	Valid
	IK2	0,493 > 0,361	0,006 < 0,05	Valid
	PMT1	0,605 > 0,361	0,000 < 0,05	Valid
	PMT2	0,377 > 0,361	0,042 < 0,05	Valid

Sumber : SPSS 21

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan bahwa seluruhnya valid.

Uji reabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Juliandi et al. (2014) Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

- Ri : Reliabilitas instrumen
 σ_1^2 : Varians Total
k : Banyaknya butir pertanyaan
 $\Sigma \sigma_b^2$: Jumlah varians butir

Table 3.8
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	R Tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,877	0,60	Reliabel
Penerapan SAP (X1)	0,838		Reliabel
Penerapan Pengendalian Intern (X2)	0,769		Reliabel

Sumber : SPSS 21

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas instrument menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena semua variabel > 0,60. Dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dari setiap

variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *SEM* dengan *PLS* merupakan suatu teknik alternatif pada analisis *SEM* berbasis varian dan memiliki keunggulan bahwa metode tersebut dapat diestimasi dengan sampel dalam jumlah yang sedikit. Penelitian ini menggunakan bantuan *software SmartPLS* yang dibangun dengan tujuan mengukur persamaan struktural yang berbasis varian.

3.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengukur validitas suatu variabel dengan indikator dengan dua cara, yaitu nilai dari *Convergent Validity* dan nilai dari *Discriminant Validity*.

1. Convergent Validity

Tujuan dalam melakukan pengukuran ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara indikator dan variabel dengan konstruk yang mendasarinya dan mengetahui apakah suatu indikator bersifat valid atau sebaliknya. Menurut Yamin dan Kurniawan (2011), tahap awal pengukuran jika menghasilkan nilai *loading factor* sekitar 0.5-0.6 dalam penelitian maka hasil tersebut dianggap cukup dan boleh untuk dilanjutkan penelitian.

2. *Discriminant Validity*

Pengukuran pada tahap ini dapat dilihat menurut nilai *Cross Loading* dalam mengukur variabel dalam indikator. Jika korelasi antar indikator dengan konstruksinya lebih tinggi dari korelasi dengan blok lainnya, hal ini menunjukkan konstruk tersebut memprediksi ukuran pada blok tersebut lebih tinggi dari korelasi dengan blok lainnya.

3. *Construct Reliability and Validity*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji reliabilitas sekumpulan indikator dalam mengukur variabel yang diukur. Nilai yang dilihat adalah nilai composite reliability dan cornbach's alpha yang diperoleh dari hasil estimasi SmartPLS. Nilai yang direkomendasikan adalah > 0.70 .

3.6.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner Model adalah *inner relation* yang lebih sering disebut evaluasi model struktural yang memiliki definisi mengenai penjelasan pengaruh antara variabel laten pada sebuah model dibangun sesuai pada isi penelitian.

1. *R-Square* (R^2)

Pengukuran digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh nilai *R-Squares* terhadap hubungan antara variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*) merupakan tujuan dari pengukuran ini. Disimpulkan bahwa terdapat kriteria pada nilai *R-Square* yaitu 0.75, 0.50, 0.25 berarti dari kriteria tersebut dapat dikatakan nilai tersebut memiliki model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).

2. *F-Square*

Pengukuran F-Square atau f^2 *effect size* adalah ukuran yang baik digunakan untuk menilai dampak reative dari suatu variabel yang mempengaruhi (*eksogen*)

terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran f^2 (f-square) disebut juga efek perubahan R^2 . Artinya, perubahan nilai R^2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, Structural equation model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS, 2018).

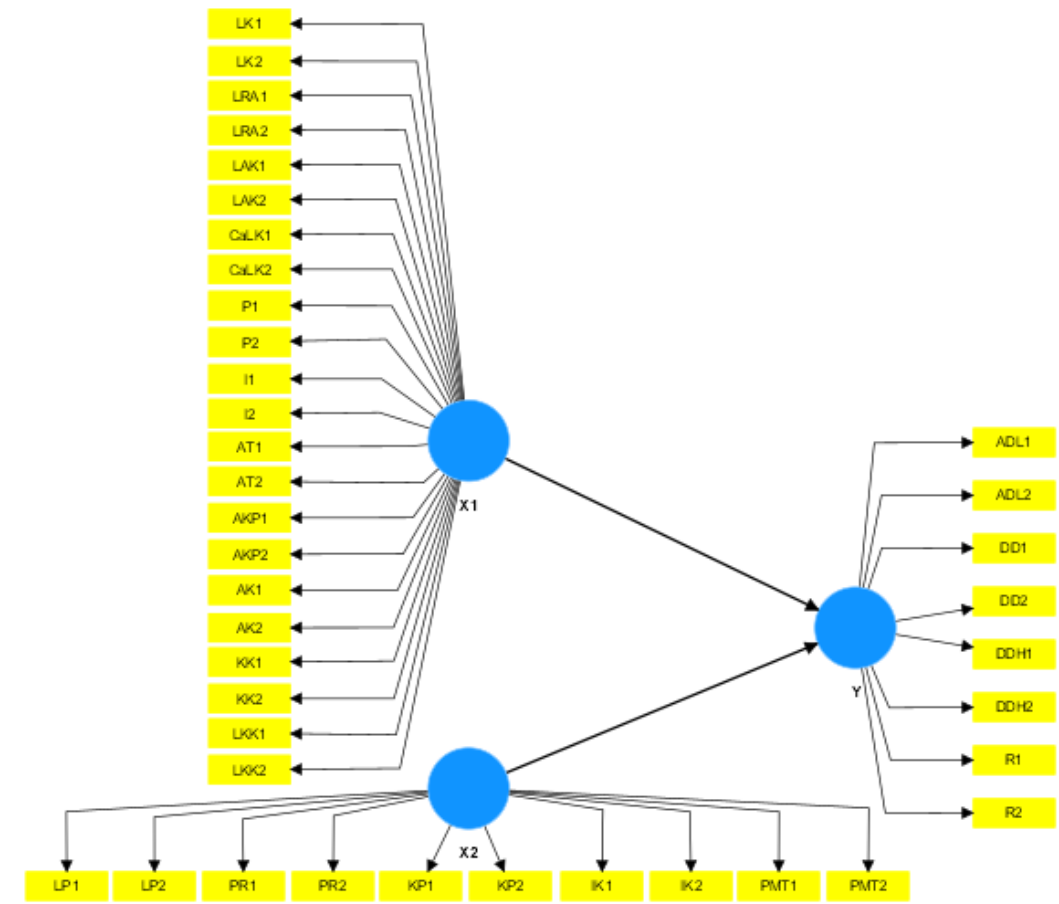
Kriteria F-Square menurut Juliandi (2018) adalah sebagai berikut: jika nilai f^2 adalah 0.02, 0.15, 0.35 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan memiliki efek kecil, sedang, besar.

3. Estimasi *Path Coefficient*

Path Coefficient yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Batasan nilai pada pengujian *Path Coefficient*, jika nilai *Path Coefficient* > 0 , maka hubungan variabel positif terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika *Path Coefficient* < 0 , maka hubungan variabel negatif.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan nilai *path coefficients*, nilai-nilai dalam t-tabel dengan t-statistik, dan nilai *p-value* yang dihasilkan dari prosedur bootstrapping pada software smartPLS. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai *path coefficients* maka nilai *original sample* > 0 , nilai statistik maka untuk alpa 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 maka t-statistik $> 1,96$, dan nilai *p-value* < 0.05 .



Gambar 3.1
Model Struktural

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbentuk Kedinasan pada Pemerintah Kota Medan, berjumlah 19 (sembilan belas) OPD. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam berupa kuesioner, dimana setiap variabel memiliki indikator dan masing-masing indikator memiliki 2 pernyataan. Variabel standar akuntansi pemerintahan (X_1) yang memiliki 11 (sebelas) indikator yaitu laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi. Variabel pengendalian intern (X_2) yang memiliki 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Variabel laporan keuangan (Y) yang memiliki 5 indikator yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kuesioner ini diberikan kepada 57 responden pada 19 OPD Kedinasan Kota Medan, dimana setiap kedinasan disebarkan 3 kuesioner pada bagian keuangan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert*.

4.1.1. Tingkat Pengembalian Angket

Adapun kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 57 kuesioner dengan rincian setiap Organisasi Perangkat Daerah di sebarakan sebanyak 3 kuesioner, dan kuesioner yang kembali atau diisi sejumlah 40 kuesioner.

Table 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuesioner disebar	57	100.00%
2.	Kuesioner yang tidak kembali	(17)	(29.82%)
3.	Kuesioner terisi	40	70.18%

Sumber : Data Diolah, 2023

4.1.2. Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari karakteristik responden berikut ini:

1. Jenis Kelamin Responden

Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	17	42,50%
2.	Perempuan	23	57,50%
	Jumlah	40	100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (42,50%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang (57,50%).

2. Usia

Data responden berdasarkan usia dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Table 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	≤ 25	8	20,00%
2.	26-30	20	50,00%
3.	31-35	8	20,00%
4.	≥ 36	4	10,00%
	Jumlah	40	100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden yang berusia ≤ 25 tahun adalah sebanyak 8 orang (20,00%). Responden yang berusia 26-30 tahun adalah sebanyak 20 orang (50,00%). Responden yang berusia 31-35 tahun adalah sebanyak 8 orang (20,00%). Responden yang berusia ≥ 36 adalah sebanyak 4 orang (10,00%).

3. Tingkat Pendidikan

Data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SMA	4	10,00%
2.	D3	9	22,50%
3.	S1	17	42,50%
4.	S2	10	25,00%
	Jumlah	40	100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang (10,00%). Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 9 orang (22,50%). Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang (42,50%). Responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 orang (25,00%).

4. Masa Kerja

Data responden berdasarkan masa kerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 4.5
Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< 3 tahun	23	57,50%
2.	3-5 tahun	9	22,50%
3.	> 5 tahun	8	20,00%
	Jumlah	40	100,00%

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden dengan masa kerja < 3 tahun sebanyak 23 orang (57,50%). Responden dengan masa kerja 3-5 tahun sebanyak 9 orang (22,50%). Responden dengan masa kerja > 5 tahun sebanyak 8 orang (20,00%).

4.1.3. Analisis Variabel Penelitian

Skala pengukuran berupa interval kelas dibutuhkan pada deskripsi variabel penelitian untuk menyajikan hasil gabungan dari seluruh tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. Terdapat skala kriteria jawaban dari responden melalui perhitungan interval kelas adalah 2.33, 3.67, 5.00 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan rendah, sedang dan tinggi.

4.1.2.1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini, variabel Kualitas Laporan Keuangan Diukur dengan 4 indikator antara lain 1) Dapat dipahami, 2) Relevan, 3) Keandalan, dan 4) Dapat Dibandingkan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat

Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel kualitas laporan keuangan yang dirangkum pada tabel berikut:

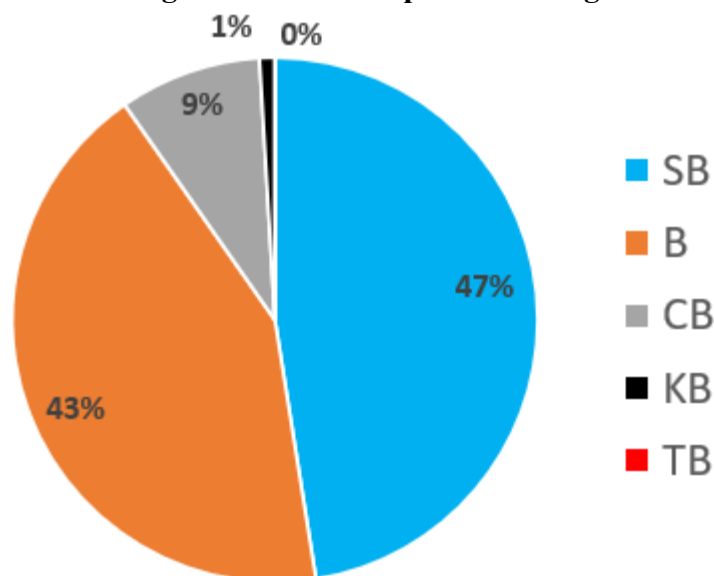
Table 4.6
Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden						Mean	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Relevan							4,51	Tinggi	
1	Laporan keuangan mengandung Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka di masa lalu .	22	15	3	0	0	40	4,48	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	37.5	7.5	0.0	0.0	100		
2	Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.	22	17	1	0	0	40	4,53	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	42.5	2.5	0.0	0.0	100		
Dapat Dibandingkan							4,28	Tinggi	
3	Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa.	17	22	1	0	0	40	4,40	Tinggi
	Perentase (%)	42.5	55.0	2.5	0.0	0.0	100		
4	Laporan keuangan yang dihasilkan berisi informasi yang dapat menggambarkan keuangan masa lalu.	12	22	6	0	0	40	4,15	Tinggi
	Perentase (%)	30.0	55.0	15.0	0.0	0.0	100		
Andal							4,28	Tinggi	
5	Laporan Keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur.	18	18	4	0	0	40	4,35	Tinggi
	Perentase (%)	45.0	45.0	10.0	0.0	0.0	100		
6	Laporan Keuangan dapat diverifikasi.	19	13	5	3	0	40	4,20	Tinggi
	Perentase (%)	47.5	32.5	12.5	7.5	0.0	100		
Dapat Dipahami							4,43	Tinggi	
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.	25	11	4	0	0	40	4,53	Tinggi
	Perentase (%)	62.5	27.5	10.0	0.0	0.0	100		
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang dapat di mengerti oleh pengguna atau pihak yang berkepentingan.	17	19	4	0	0	40	4,33	Tinggi
	Perentase (%)	42.5	47.5	10.0	0.0	0.0	100		
Rata-rata							4,37	Tinggi	

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka diketahui variabel Y memiliki rata-rata yang tinggi senilai 4.37. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Kualitas Laporan Keuangan



Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 47%, Baik 43%, Cukup Baik 9%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%.

4.1.2.2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Dalam penelitian ini, varibel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan 11 indikator antara lain 1) Laporan Keuangan 2) Laporan Realisasi Anggaran 3) Laporan Arus Kas 4) Catatan Atas Laporan Keuangan 5) Akuntansi Persediaan 6) Akuntansi Investasi 7) Akuntansi Aset Tetap 8) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9) Akuntansi Kewajiban 10) Koreksi Kesalahan 11) Laporan Keuangan Konsolidasi. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel standar akuntansi pemerintahan yang dirangkum pada tabel berikut:

Table 4.7
Deskripsi Jawaban Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

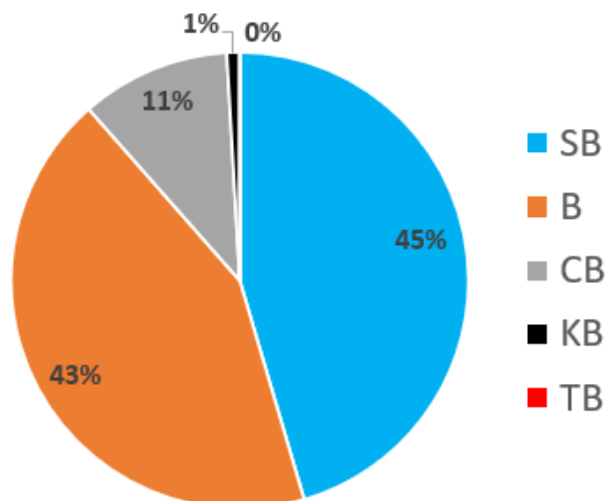
No.	Pernyataan	Tanggapan Responden						Mean	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Laporan Keuangan								4,52	Tinggi
1	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	24	15	1	0	0	40	4,58	Tinggi
	Perentase (%)	60.0	37.5	2.5	0.0	0.0	100		
2	Dalam menyusun laporan keuangan instansi ini menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	22	14	4	0	0	40	4,45	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	35.0	10.0	0.0	0.0	100		
Laporan Realisasi Anggaran								4,48	Tinggi
3	Saat ada pengeluaran dari rekening kas, instansi ini diakui sebagai belanja.	22	17	1	0	0	40	4,53	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	42.5	2.5	0.0	0.0	100		
4	Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas.	19	19	2	0	0	40	4,43	Tinggi
	Perentase (%)	47.5	47.5	5.0	0.0	0.0	100		
Laporan Arus Kas								4,43	Tinggi
5	Instansi ini menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.	23	14	3	0	0	40	4,50	Tinggi
	Perentase (%)	57.5	35.0	7.5	0.0	0.0	100		
6	Instansi ini menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi.	19	16	5	0	0	40	4,35	Tinggi
	Perentase (%)	47.5	40.0	12.5	0.0	0.0	100		
Catatan Atas Laporan Keuangan								4,38	Tinggi
7	Instansi ini menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.	19	20	21	0	0	40	4,45	Tinggi
	Perentase (%)	47.5	50.0	2.5	0.0	0.0	100		
8	Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.	17	18	5	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	42.5	45.0	12.5	0.0	0.0	100		
Akuntansi Persediaan								4,30	Tinggi
9	Instansi ini mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.	14	18	8	0	0	40	4,15	Tinggi
	Perentase (%)	35.0	45.0	20.0	0.0	0.0	100		
10	Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik.	20	18	2	0	0	40	4,45	Tinggi
	Perentase (%)	50.0	45.0	5.0	0.0	0.0	100		
Akuntansi Investasi								4,19	Tinggi
11	Instansi ini mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.	16	19	4	1	0	40	4,25	Tinggi
	Perentase (%)	40.0	47.5	10.0	2.5	0.0	100		
12	Dinas ini mencatat investasi sebesar biaya perolehan untuk kepemilikan permanen.	15	16	8	1	0	40	4,13	Tinggi
	Perentase (%)	37.5	40.0	20.0	2.5	0.0	100		

Aset Tetap								4,25	Tinggi
13	Instansi ini mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.	15	22	3	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	37,5	55,0	7,5	0,0	0,0	100		
14	Instansi ini mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan.	16	16	8	0	0	40	4,20	Tinggi
	Perentase (%)	40,0	40,0	20,0	0,0	0,0	100		
Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan								4,29	Tinggi
15	Instansi ini mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.	19	15	5	1	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	47,5	37,5	12,5	2,5	0,0	100		
16	Instansi ini memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap jika pekerjaan konstruksi telah selesai	17	18	4	1	0	40	4,28	Tinggi
	Perentase (%)	42,5	45,0	10,0	2,5	0,0	100		
Akuntansi Kewajiban								4,22	Tinggi
17	Instansi ini mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.	16	14	7	3	0	40	4,08	Tinggi
	Perentase (%)	40,0	35,0	17,5	7,5	0,0	100		
18	Instansi ini mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal.	17	21	1	1	0	40	4,35	Tinggi
	Perentase (%)	42,5	52,5	2,5	2,5	0,0	100		
Koreksi Kesalahan								4,32	Tinggi
19	Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.	17	18	5	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	42,5	45,0	12,5	0,0	0,0	100		
20	Instansi ini melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan.	18	17	5	0	0	40	4,33	Tinggi
	Perentase (%)	45,0	42,5	12,5	0,0	0,0	100		
Laporan Keuangan Konsolidasi								4,30	Tinggi
21	Instansi ini dapat menyajikan laporan keuangan Konsolidasi.	16	20	4	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	40,0	50,0	10,0	0,0	0,0	100		
22	Laporan keuangan konsolidasi mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.	19	14	17	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	47,5	35,0	17,5	0,0	0,0	100		
Rata-rata								4,33	Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, maka diketahui variabel X1 memiliki rata-rata yang tinggi senilai 4.33. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:

Gambar 4.2
Diagram Standar Akuntansi Pemerintahan



Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 45%, Baik 43%, Cukup Baik 11%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%.

4.1.2.3. Variabel Pengendalian Intern (X2)

Dalam penelitian ini, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan 11 indikator antara lain 1) Lingkungan Pengendalian 2)Penaksiran Resiko 3) Kegiatan Pengendalian 4) Informasi Dan Komunikasi 5) Pemantauan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel standar akuntansi pemerintahan yang dirangkum pada tabel berikut:

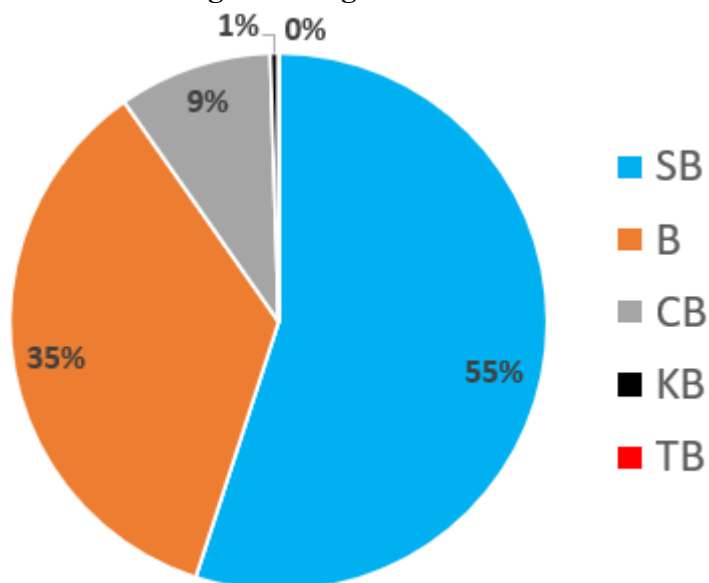
Table 4.8
Deskripsi Jawaban Variabel Pengendalian Intern

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden						Mean	Kategori
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Lingkungan Pengendalian								4,45	Tinggi
1	Semua pegawai telah mematuhi kode etik yang dibuat.	22	14	4	0	0	40	4,45	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	35.0	10.0	0.0	0.0	100		
2	Semua pegawai harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika.	20	18	2	0	0	40	4,45	Tinggi
	Perentase (%)	50.0	45.0	5.0	0.0	0.0	100		
Penaksiran Resiko								4,30	Tinggi
3	Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.	19	16	3	2	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	47.5	40.0	15.0	0.0	0.0	100		
4	Instansi ini telah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko yang muncul.	18	16	6	0	0	40	4,30	Tinggi
	Perentase (%)	45.0	40.0	15.0	0.0	0.0	100		
Kegiatan Pengendalian								4,54	Tinggi
5	Instansi ini memiliki SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) untuk setiap aktivitas yang dilakukan.	25	13	2	0	0	40	4,58	Tinggi
	Perentase (%)	62.5	32.5	5.0	0.0	0.0	100		
6	Instansi ini melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.	23	14	3	0	0	40	4,50	Tinggi
	Perentase (%)	57.5	35.0	7.5	0.0	0.0	100		
Informasi dan Komunikasi								4,42	Tinggi
7	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.	20	10	10	0	0	40	4,25	Tinggi
	Perentase (%)	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	100		
8	Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.	25	13	2	0	0	40	4,58	Tinggi
	Perentase (%)	62.5	32.5	5.0	0.0	0.0	100		
Pemantauan								4,54	Tinggi
9	Instansi ini selalu dievaluasi oleh inspektorat dan BPK terkait laporan keuangan.	22	16	2	0	0	40	4,50	Tinggi
	Perentase (%)	55.0	40.0	5.0	0.0	0.0	100		
10	Instansi ini selalu melakukan <i>Back Up</i> data secara rutin.	26	11	3	0	0	40	4,58	Tinggi
	Perentase (%)	65.0	27.5	7.5	0.0	0.0	100		
Rata-rata								4,45	Tinggi

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka diketahui variabel X2 memiliki rata-rata yang tinggi senilai 4.45. Dengan persentase jawaban responden sebagai berikut:

Gambar 4.3
Diagram Pengendalian Intern



Dari diagram diatas dapat dilihat persentase tanggapan responden pada pernyataan di variabel kualitas laporan keuangan dengan katagori Sangat Baik 55%, Baik 35%, Cukup Baik 9%, Kurang Baik 1%, dan Tidak Baik 0%..

4.2. Analisis Data

4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan dua pengujian pada tahap ini. Uji validitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel telah memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitian. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan keakuratan, konsistensi dan kebenaran alat ukur dalam mengukur variabel pada setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian.

Indikator yang merupakan perwujudan dari variabelnya yang digunakan dalam penelitian ini dalam evaluasi pengujian *outer model*. *Discriminant Validity* merupakan evaluasi pengukuran indikator dalam pengujian *outer model* yang digunakan untuk menguji validitas. Nilai *loading factor* untuk tiap indikator pada

variabel diperoleh dari pengujian *Convergent Validity*. Nilai *cross loading* diperoleh dari pengujian *Discriminant Validity*. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* merupakan 2 evaluasi dalam menguji reliabilitas pada saat pengukuran indikator. Perhitung dengan cara *calculate* menggunakan prosedur *Path Algorithm* dalam *smartPLS* bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi dari *outer model*.

4.2.1.1. *Convergent Validity*

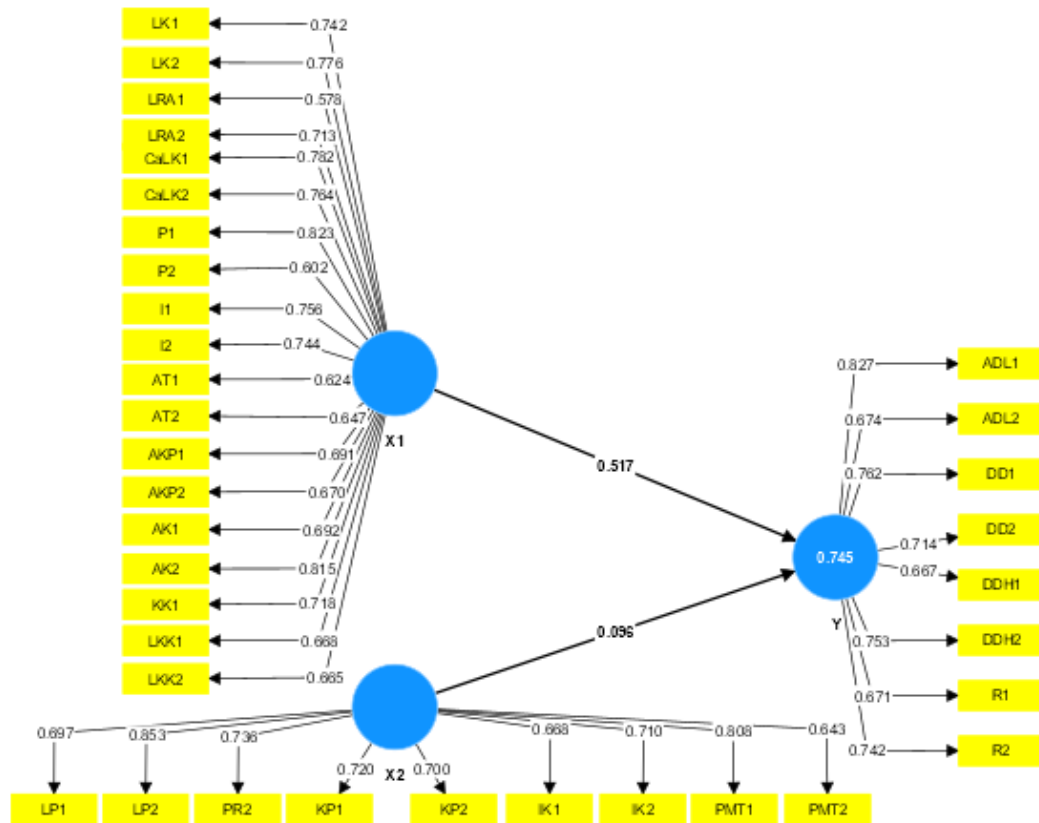
Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari hubungan antara indikator dan konstruk terhadap variabel yang mendasarinya. Nilai *factor loading* yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut memang menjelaskan variabel yang diukur. Menurut Yamin dan Kurniawan (2011) indikator yang memiliki *loading factor* antara 0.5-0.6 dapat diterima.

Table 4.9
Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE
X1 (Standar Akuntansi Pemerintah)	LK1	0.720	0.460
	LK2	0.760	
	LRA1	0.599	
	LRA2	0.721	
	LAK1	0.504	
	LAK2	0.353	
	CaLK1	0.776	
	CaLK2	0.748	
	P1	0.809	
	P2	0.634	
	I1	0.752	
	I2	0.739	
	AT1	0.628	
	AT2	0.645	
	AKP1	0.666	
	AKP2	0.662	
	AK1	0.676	
	AK2	0.806	
	KK1	0.719	
	KK2	0.449	
LKK1	0.683		
LKK2	0.676		
X2 (Pengendalian Intern)	LP1	0.712	0.514
	LP2	0.831	
	PR1	0.607	
	PR2	0.768	

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE
	KP1	0.693	
	KP2	0.716	
	IK1	0.663	
	IK2	0.711	
	PMT1	0.790	
	PMT2	0.649	
Y (Kualitas Laporan Keuangan)	R1	0.670	0.530
	R2	0.741	
	DD1	0.762	
	DD2	0.714	
	ADL1	0.826	
	ADL2	0.675	
	DDH1	0.666	
	DDH2	0.755	

Indikator yang dieliminasi pada model ini ada 3 yaitu LAK1, LAK2, KK2. Karena 3 indikator ini memiliki nilai *loading factor* dibawah 0.50. Ketika 3 indikator tersebut sudah dihapuskan tetapi nilai *P-Values* variabel X2 0.068 diatas 0.05 sehingga dihilangkan salah satu variabel X2 dengan nilai faktor terendah yaitu PR1. Setelah menghilangkan indikator variabel yang tidak valid dalam model, selanjutnya model kembali di calculate sehingga menghasilkan nilai outer loading yang baru dan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.4
Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model

4.2.1.2. *Discriminant Validity*

Tahap *Discriminant Validity* pada penelitian ini terdapat 1 tahap untuk evaluasi, yaitu membandingkan hubungan antara indikator dari variabel laten dengan indikator dari variabel laten lainnya. Jika hubungan antara indikator dari variabel laten lebih besar daripada hubungan dari indikator variabel laten lainnya, maka terbukti bahwa indikator dari variabel laten lebih dapat menentukan ukuran blok secara baik daripada variabel laten lainnya.

Table 4.10
Cross Loading

Variabel	X1	X2	Y
LK1	0.742		
LK2	0.776		
LRA1	0.578		
LRA2	0.713		
CaLK1	0.782		
CaLK2	0.764		
P1	0.823		
P2	0.602		
I1	0.756		
I2	0.744		
AT1	0.624		
AT2	0.647		
AKP1	0.691		
AKP2	0.670		
AK1	0.692		
AK2	0.815		
KK1	0.718		
LKK1	0.668		
LKK2	0.665		
LP1	0.530	0.679	
LP2	0.732	0.853	
PR2	0.722	0.736	
KP1	0.610	0.720	
KP2	0.504	0.700	
IK1	0.616	0.668	
IK2	0.514	0.710	
PMT1	0.645	0.808	
PMT2	0.433	0.643	
R1	0.492	0.551	0.671
R2	0.546	0.710	0.742
DD1	0.663	0.546	0.762
DD2	0.710	0.446	0.714
ADL1	0.714	0.682	0.827
ADL2	0.640	0.514	0.674
DDH1	0.492	0.655	0.667
DDH2	0.492	0.655	0.667

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai korelasi indikator variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten lainnya, maka dapat dikatakan bahwa indikator dari variabel laten dapat menentukan besarnya blok bahkan lebih baik dari variabel laten lainnya.

4.2.1.3. *Construct Reliability and Validity*

Instrumen reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Penggunaan *cronbach's alpha* cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan *composite reliability* sehingga disarankan untuk menggunakan *composite reliability* (Haryono, 2017). Sebuah konstruk dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar 0,70, sedangkan menurut Ghazali (2005) variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70.

Table 4.11
Construct Validity and Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0.900	0.917	0.918	0.508
Pengendalian Intern	0.897	0.915	0.915	0.549
Kualitas laporan Keuangan	0.915	0.916	0.940	0.798

Berdasarkan Tabel 4.11, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,70. Oleh karena itu indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada tabel 4.11 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator dan variabel dinyatakan valid.

4.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* merupakan tahap yang dilakukan selanjutnya. Pengertian *Inner Model* adalah model yang menjelaskan pengaruh hubungan antara variabel laten yang dibangun sesuai dengan isi penelitian. Menghitung *R-Square*, *Path Coefficient*, merupakan evaluasi yang terdapat pada tahap evaluasi *inner model*.

4.2.2.1. *R-Square*

Tahap pengujian R-Square memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat kriteria nilai R-Square untuk variabel laten dependen (terikat) adalah 0.75, 0.50, 0.25 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan model kuat, sedang dan lemah (Hair et al., 2011).

Table 4.12
Nilai R-Square

Item	R-Square
Y (Kualitas Laporan Keuangan)	0.745

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* memiliki nilai sebesar 0.745, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengendalian Intern (X2) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 74%.

4.2.2.2. *F-Square*

Pengukuran F-Square dilakukan untuk menilai dampak reative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria F-Square menurut Juliandi (2018) adalah sebagai berikut: jika nilai f^2 adalah 0.02, 0.15, 0.35 berarti kriteria nilai tersebut dapat dikatakan memiliki efek kecil, sedang, besar.

Table 4.13
F-Square

Variabel	X1	X2	Y
X1			0.517
X2			0.096
Y			

Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat pada tabel 4.13 adalah sebagai berikut: Variabel X1 dan X2 terhadap Y masing-masing memiliki $f^2 = 0.517$ dan $f^2 = 0.096$, maka efek yang besar dari variabel eksogen (X1) terhadap endogen (Y) dan efek yang kecil dari variabel eksogen (X2) terhadap endogen (Y).

4.2.2.3. *Path Coefficient*

Tahap pengujian *Path Coefficient* dilakukan untuk menguji apakah sebuah variabel memiliki arah hubungan positif atau negatif terhadap variabel lainnya. Terdapat batasan nilai pada pengujian *Path Coefficient*, yaitu jika nilai *Path Coefficient* > 0 , maka variabel memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika *Path Coefficient* < 0 , maka variabel memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel lainnya..

Table 4.14
Hasil Path Coefficient

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standart Deviation	T Statistics	P Value	Hasil
SAP → Kualitas Laporan Keuangan	0.628	0.625	0.111	5.646	0.000	Valid
Pengendalian Intern → Kualitas Laporan Keuangan	0.271	0.288	0.120	2.256	0.024	Valid

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai *Path Coefficient* seluruh hipotesis > 0 , maka hal tersebut menyatakan bahwa hubungan setiap hipotesis memberikan hubungan yang positif.

4.2.3. Uji Hipotesis

Nilai *Path Coefficients*, *T-Statistics* dan *P-Values* dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian pada hipotesis yang telah ditentukan pada penelitian ini. Cara untuk melakukannya yaitu dengan mengetahui nilai signifikansi antara variabel. Pengujian hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Jika nilai *Path Coefficients* > 0 menunjukkan bahwa hipotesis mengarah positif, sebaliknya jika nilai *Path Coefficients* < 0 menunjukkan bahwa hipotesis mengarah negatif. Nilai *P-Values* dalam pengujian hipotesis harus menghasilkan nilai < 0.05 dapat dikatakan memiliki pengaruh. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.
2. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Medan.

Table 4.15
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficiens	T Statistics	P Value	Hasil
SAP → Kualitas Laporan Keuangan	0.628	5.646	0.000	Valid
Pengendalian Intern → Kualitas Laporan Keuangan	0.271	2.256	0.024	Valid

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *Path Coefficients* pada variabel standar akuntansi pemerintah dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.628, maka nilai *Path Coefficients* > 0 , untuk nilai *P-Values* sebesar 0.000, maka nilai *P-Values* < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Nilai *Path Coefficients* pada variabel pengendalian intern dalam pengujian hipotesis mendapat nilai sebesar 0.271, maka nilai *Path Coefficients* > 0 , untuk nilai *P-Values* sebesar 0.024, maka nilai *P-Values* < 0.05 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.4. Pembahasan

4.2.4.1. Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai *Path Coefficients* sebesar $0,628 > 0$. Pengaruh tersebut mempunyai *P-Values* sebesar $0,000 < 0,05$, berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan, dimana dengan semakin baiknya penggunaan standar akuntansi pemerintahan maka akan lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan.

Dalam penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur dengan 11 indikator yaitu penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi

kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan hasil outer loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading laporan realisasi anggaran dengan kode LRA1 menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.578 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator akuntansi persediaan dengan kode P1 sebesar 0.823 dari penelitian atas tanggapan responden mengenai indikator laporan realisasi anggaran diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan yang diajukan dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden laki-laki sebanyak 17 responden (42,50%), dan perempuan sebanyak 23 responden (57,50%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan adalah perempuan. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia ≤ 25 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), usia 26-39 tahun sebanyak 20 responden (50,00%), usia 31-35 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), dan usia ≥ 36 tahun sebanyak 4 orang (10,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD kota Medan berusia 26-39 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan sejumlah responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 4 responden (10,00%), pendidikan D3 sebanyak 9 responden (22,50%), pendidikan S1 sebanyak 17 responden (42,50%), dan pendidikan S2 sebanyak 10 responden (25,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Dari hasil deskripsi responden ditemukan sejumlah responden memiliki masa kerja < 3 tahun sebanyak 23 responden (57,50%), masa kerja 3-5 tahun sebanyak 9 responden (22,50%), dan > 5 tahun sebanyak 8 responden (20,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD kota Medan memiliki masa kerja < 3 tahun. Sehingga penerapan

standar akuntansi pemerintahan dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal dan menyebabkan sering terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar melakukan pelatihan penggunaan sistem akuntansi pemerintah sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Dalibas, dkk 2015, 8). Hal ini berarti semakin baik penerapan SAP di dalam suatu laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maydiyanti, dkk (2020); Andi Kusnadi, dkk (2022); Susanto, dkk (2021); Karsana dan Suarana (2017); serta Sihite dan Holiawati (2017) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden pada 19 (sembilan belas) OPD Kedinasan Kota Medan yang menjawab sangat baik sebanyak 45%, yang menjawab baik sebanyak 43%, yang menjawab cukup baik 11%, yang menjawab kurang baik 1%, dan yang menjawab tidak baik 0%. Hal ini berarti jika penerapan standar akuntansi pemerintah meningkat, maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.

4.2.4.2. Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai *Path Coefficients* sebesar $0,271 > 0$. Pengaruh tersebut mempunyai *P-Values* sebesar $0,024 < 0,05$, berarti penerapan pengendalian intern berpengaruh dan mengarah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan, dimana dengan semakin baiknya penerapan pengendalian intern maka akan penyusunan laporan keuangan akan semakin terkendali dan sistematis sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik pada organisasi perangkat daerah di Kota Medan.

Dalam penelitian ini penerapan pengendalian intern diukur dengan 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan hasil outer loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading pemantauan dengan kode PMT2 menghasilkan nilai terendah yaitu sebesar 0.649 dan outer loading tertinggi terdapat pada indikator lingkungan pengendalian dengan kode LP1 sebesar 0.831 dari penelitian atas tanggapan responden mengenai indikator pemantauan diketahui masih terdapat responden yang memberikan jawaban kurang baik atas pernyataan yang diajukan dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden memiliki usia ≤ 25 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), usia 26-39

tahun sebanyak 20 responden (50,00%), usia 31-35 tahun sebanyak 8 responden (20,00%), dan usia ≥ 36 tahun sebanyak 4 orang (10,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD kota Medan berusia 26-39 tahun. Dari hasil deskripsi responden ditemukan jumlah responden laki-laki sebanyak 17 responden (42,50%), dan perempuan sebanyak 23 responden (57,50%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan adalah perempuan. Dari hasil deskripsi responden ditemukan sejumlah responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 4 responden (10,00%), pendidikan D3 sebanyak 9 responden (22,50%), pendidikan S1 sebanyak 17 responden (42,50%), dan pendidikan S2 sebanyak 10 responden (25,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD Kota Medan memiliki pendidikan yang cukup yaitu S1. Dari hasil deskripsi responden ditemukan sejumlah responden memiliki masa kerja < 3 tahun sebanyak 23 responden (57,50%), masa kerja 3-5 tahun sebanyak 9 responden (22,50%), dan > 5 tahun sebanyak 8 responden (20,00%). Hal ini berarti sebagian besar responden yang bekerja di OPD kota Medan memiliki masa kerja < 3 tahun. Sehingga penerapan pengendalian intern dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal dan menyebabkan sering terjadinya keterlambatan penyajian laporan keuangan dan kurang akuratnya laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar dapat menerapkan pengendalian intern lebih maksimal dan secara menyeluruh sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern merupakan langkah awal untuk memaksimalkan pengerjaan laporan keuangan dan meminimalisir kecurangan. Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Hal ini berarti semakin baik penerapan pengendalian intern di dalam suatu laporan keuangan, maka diharapkan semakin baik juga kualitas tata kelolaan keuangan negara baik itu laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dkk (2019); Suratman, dkk (2022); Maydiyanti, dkk (2020); Agung dan Gayatri (2018); serta Holle, dkk (2019) bahwa penerapan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden pada 19 (sembilan belas) OPD Kedinasan Kota Medan yang menjawab sangat baik sebanyak 55%, yang menjawab baik sebanyak 53%, yang menjawab cukup baik 9%, yang menjawab kurang baik 1%, dan yang menjawab tidak baik 0%. Hal ini berarti jika pengendalian intern meningkat, maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Medan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Medan dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika penerapan standar akuntansi pemerintahan berjalan dengan optimal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Medan dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan optimal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melihat dari penerapan sistem akuntansi pemerintah dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang belum maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar melaksanakan pelatihan penggunaan standar akuntansi

pemerintahan sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat.

2. Melihat dari penerapan pengendalian intern dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan belum maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang akurat. Dalam hal ini diharapkan seluruh pimpinan OPD Kota Medan agar sudah menerapkan pengendalian intern dan memaksimalkan penerapannya sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh selain variabel sebelumnya. Secara konseptual, penelitian ini berfokus pada aspek kemampuan teknologi informasi, dan kinerja karyawan. Hal tersebut diperlukan adanya penelitian serupa yang berfokus pada aspek lain, seperti kompetensi SDM dan hal yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Kartika, D., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Agung, T. M., & Gayatri. (2018, Mei). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1253-1276. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p17>
- Allen, & Mayer. (1997). *Commitment in The Workplace Theory Research and Application*. California: Sage Publication.
- Assauri, S. (2015). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dalibas, Nasution, R., & Suwanda, D. (2015). *Bagan Akun Standar: Sistem Akuntansi Akrual Pemerintan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan pada Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: PT. Indeks.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Gaspersz, V. (2011). *Total Quality Management*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ghozali, I. (2014). Partial Least Square, Konse Teknik dan Aplikasi SmartPLS 3.0.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9 ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 139-152. doi:<https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan (5 ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Metodologi Penelitian: Salah Kaprah Dan PengalamanPengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Juliandi, A. (2018). Structural equatuion model based partial least square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Konsep dan Aplikasi*. (F. Zulkarnain, Penyunt.) Medan, Sumatera Utara: UMSU PRES. Diambil kembali dari <http://umsupress.com>
- Karsana, I. W., & Suarana, I. G. (2017, Oktober). PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN SPI PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 643-670.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial least squares : konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahsum, M. (2006). *Pengukuran kinerja sector publik*. Yogyakarta: BPEF.
- Maria, M. E. (2011). *Akuntansi Dasar (untuk pemula)*. Jakarta: Erlangga.
- Martono. (2015). *Manajemen Keuangan* (Kedua ed.). Yogyakarta: EKONISIA.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020, Juni). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 69-78. Diambil kembali dari <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* (Ketiga ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (Keempat ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Kedua ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan, D., & dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pura, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Rajawali Pers.
- Rangkuti, A. Z., Sari, E. N., & Astuty, W. (2022). DETERMINANT ANALYSIS OF THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS WITH THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROLS SYSTEM AS MODERATING VARIABLES IN THE GOVERNMENT MANDAILING DISTRICT CHRISTMAS. *Jurnal of Economics*, 11(02), 1325-1332. Diambil kembali dari <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Rudiyanto. (2012). *Pengantar akuntansi : konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*. (S. Saat, Penyunt.) Jakarta: Erlangga.
- Safitri, D. (2017). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 174-189.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2014). *Perilaku konsumen : pendekatan praktis disertai himpunan jurnal penelitian*. (N. WK, Penyunt.) Yogyakarta: Andi.
- Sawyer. (2005). *Sawyer's Internal Auditing*. (M. A. Lawrence B., Penyunt.) Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (3 ed.). Yogyakarta: STIE. YKPN.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (Pertama ed.). Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Stoner, J. A., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2003). *Manajemen. Jilid II*. Jakarta: Indeks Gramedia Grup.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (2 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan* (Pertama ed.). Bandung: Lingga Jaya.
- Susanto, H., Sari, E. N., & Sari, M. (2021, November). Factors Affecting the Quality of Financial Reports in the. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12264-12278. doi:<https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3291>

- suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ketga)*. BPFE Yogyakarta.
- Tanjung, A. H. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual untuk SKPD (Pertama ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, J. I., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *KAJIAN AKUNTANSI*, 22(2), 175-205.
- Thomas. (2013). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBAWANG KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 51-64.
- Wahyuni, N. S., Muhyarsyah, & Sari, E. N. (2019). THE INFLUENCE OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE AVAILABILITY OF BUDGETS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENT (Case Study in local governments in North Sumatra). *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan*, 660-670.
- Winidyaningrum, C., & Rahmawati. (2010). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN VARIABEL INTERVENING PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 1-28.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Opini LKPD Tahun 2017-2021

No.	Entitas Pemerintah Daerah		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Provinsi Sumatera Utara							
	LKPD		34	34	34	34	34	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	26	Kab. Asahan	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	27	Kab. Batu Bara	1	WDP	1	WTP	1	WTP
4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	WTP	1	WTP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP
11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WTP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP
16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WTP	1	WDP	1	WTP
20	44	Kab. Samosir	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WTP	1	WTP
22	46	Kab. Simalungun	1	TMP	1	TMP	1	WDP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	50	Kab. Toba	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	51	Kota Binjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP
28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WTP	1	WTP
29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WDP	1	WTP
30	54	Kota Padang Sidempuan	1	WDP	1	WDP	1	WTP
31	55	Kota Pematangsiantar	1	WTP	1	WDP	1	WDP
32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WTP	1	WTP
33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	WDP
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WTP	1	WTP

**Tabel 2. 4 Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Wilayah Provinsi Sumatera Utara**

Permasalahan		Jumlah Pemda	Keterangan (Kabupaten/Kota)
A. Penyusunan Laporan Keuangan			
1.	Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat	17	Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Nias Utara, Padang Lawas, Papak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan, Padang Sidempuan
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh DPRD	1	Humbang Hasundutan
B. Pendapatan			
1.	Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib	8	Deli Serdang, Langkat, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan
2.	Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan	13	Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
3.	Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai Ketentuan	2	Tapanuli Tengah, Sibolga
C. Belanja			
1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	22	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Gunungsitoli, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak		6	Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan
3. Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal		34	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi
4. Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa		9	Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, Padang Sidempuan, Tebing Tinggi
5. Kelebihan Pembayaran TKI dan Tunjangan Perumahan		1	Dairi
6. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		14	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Papak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan, Sibolga
7. Pengelolaan Dana BOS belum Memadai		13	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, Langkat, Nias Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi
8. Kelebihan Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah		1	Karo
9. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses DPRD		2	Labuhanbatu, Binjai
10. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan		10	Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Labuhanbatu, Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, Gunungsitoli, Sibolga, Tebing Tinggi
11. Kelebihan Pembayaran BTT, Uang Lelah Petugas Posko GTPP, Honorarium Penanganan Covid-19		11	Provinsi Sumatera Utara, Dairi, Karo, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi
D. Pembiayaan			
1.	Perencanaan dan Pengawasan Investasi dalam Bentuk Penyertaan Modal kepada PT BNC Belum Memadai	1	Nias Selatan
2.	Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut dan PDAM Muat Nauli Tidak Sesuai Ketentuan	1	Tapanuli Tengah
3.	Investasi Jangka Panjang Permanen pada PD Sibolga Nauli Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	Sibolga
E. Aset			
1.	Penatausahaan Persediaan Belum Tertib	19	Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Papak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun,

DATA RESPONDEN

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

Nama Responden :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : ≤ 25 26-30 31-35 ≥ 36

Pendidikan : SMA D3 S1 S2

Lama Bekerja : < 3 tahun 3-5 tahun > 5 tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu/saudara yang kami hormati, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tanda (\checkmark). Pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner ini disebarikan dalam rangka penelitian skripsi akuntansi.

Penilaian menggunakan skala dengan 5 alternatif sebagai berikut :

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- CB = Cukup Baik
- KB = Kurang Baik
- TB = Tidak Baik

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (X1)

No.	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
Laporan Keuangan						
1.	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.					
2.	Dalam menyusun laporan keuangan instansi ini menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
Laporan Realisasi Anggaran						
3.	Saat ada pengeluaran dari rekening kas, instansi ini diakui sebagai belanja.					
4.	Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas.					
Laporan Arus Kas						
5.	Instansi ini menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.					
6.	Instansi ini menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi.					
Catatan Atas Laporan Keuangan						
7.	Instansi ini menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
8.	Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.					
Akuntansi Persediaan						
9.	Instansi ini mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.					
10.	Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik.					
Akuntansi Investasi						
11.	Instansi ini mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.					
12.	Dinas ini mencatat investasi sebesar biaya perolehan untuk kepemilikan permanen.					
Aset Tetap						
13.	Instansi ini mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.					
14.	Instansi ini mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan.					

Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan					
15.	Instansi ini mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.				
16.	Instansi ini memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke asset tetap jika pekerjaan konstruksi telah selesai				
Akuntansi Kewajiban					
17.	Intansi ini mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.				
18.	Intansi ini mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal.				
Koreksi Kesalahan					
19.	Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.				
20.	Intansi ini melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan.				
Laporan Keuangan Konsolidasi					
21.	Instansi ini dapat menyajikan laporan keuangan Konsolidasi.				
22.	Laporan keuangan konsolidasi mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.				

PENGENDALIAN INTERN (X1)

No.	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
Lingkungan Pengendalian						
1.	Semua pegawai telah mematuhi kode etik yang dibuat.					
2.	Semua pegawai harus memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
Penaksiran Resiko						
3.	Didalam instansi harus terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal maupun eksternal.					
4.	Instansi ini telah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko yang muncul.					
Kegiatan Pengendalian						
5.	Instansi ini memiliki SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) untuk setiap aktivitas yang dilakukan.					
6.	Instansi ini melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk					

No.	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
	memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
8.	Di dalam instansi Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan.					
Pemantauan						
9.	Instansi ini selalu dievaluasi oleh inspektorat dan BPK terkait laporan keuangan.					
10.	Instansi ini selalu melakukan <i>Back Up</i> data secara rutin.					

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)

No.	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
Relevan						
1.	Laporan keuangan mengandung Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka di masa lalu .					
2.	Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
Dapat dibandingkan						
3.	Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa.					
4.	Laporan keuangan yang dihasilkan berisi informasi yang dapat menggambarkan keuangan masa lalu.					
Andal						
5.	Laporan Keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur.					
6.	Laporan Keuangan dapat diverifikasi					
Dapat Dipahami						
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.					
8.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang dapat di mengerti oleh pengguna atau pihak yang berkepentingan.					

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.945	0.947	0.951	0.507
X2	0.889	0.903	0.910	0.531
Y	0.872	0.877	0.900	0.530

Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y	0.628	0.625	0.111	5.646	0.000
X2 -> Y	0.271	0.288	0.120	2.256	0.024

Outer Loading

	X1	X2	Y
ADL1			0.826
ADL2			0.675
AK1	0.676		
AK2	0.808		
AKP1	0.666		
AKP2	0.662		
AT1	0.628		
AT2	0.645		
CaLK1	0.776		
CaLK2	0.748		
DD1			0.762
DD2			0.714
DDH1			0.666
DDH2			0.755
I1	0.752		
I2	0.739		
IK1		0.663	
IK2		0.711	
KK1	0.719		
KK2	0.449		
KP1		0.693	
KP2		0.716	
LAK1	0.504		
LAK2	0.353		
LK2	0.760		
LKK1	0.683		
LKK2	0.676		
LP1		0.712	
LP2		0.831	
LRA1	0.599		
LRA2	0.721		
P1	0.809		
P2	0.634		
PMT1		0.790	
PMT2		0.649	
PR1		0.607	
PR2		0.768	
R1			0.670
R2			0.741
LK1	0.720		

Cross Loading

	X1	X2	Y
ADL1	0.714	0.682	0.827
ADL2	0.640	0.514	0.674
AK1	0.692	0.419	0.571
AK2	0.815	0.581	0.676
AKP1	0.691	0.462	0.686
AKP2	0.670	0.505	0.664
AT1	0.624	0.532	0.493
AT2	0.647	0.497	0.464
CaLK1	0.782	0.724	0.631
CaLK2	0.764	0.641	0.581
DD1	0.663	0.546	0.762
DD2	0.718	0.446	0.714
DDH1	0.492	0.655	0.667
DDH2	0.638	0.464	0.753
I1	0.756	0.680	0.625
I2	0.744	0.679	0.691
IK1	0.616	0.668	0.516
IK2	0.514	0.710	0.601
KK1	0.718	0.454	0.520
KP1	0.610	0.720	0.584
KP2	0.504	0.700	0.542
LK2	0.776	0.595	0.607
LKK1	0.668	0.535	0.433
LKK2	0.665	0.553	0.490
LP1	0.530	0.697	0.550
LP2	0.732	0.853	0.786
LRA1	0.578	0.678	0.655
LRA2	0.713	0.707	0.595
P1	0.823	0.509	0.661
P2	0.602	0.580	0.617
PMT1	0.645	0.808	0.581
PMT2	0.433	0.643	0.354
PR2	0.722	0.736	0.489
R1	0.492	0.551	0.671
R2	0.546	0.710	0.742
LK1	0.742	0.640	0.640

R-Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.745	0.731

F-Square

	X1	X2	Y
X1			0.517
X2			0.096
Y			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Dara Anindya Pratiwi
NPM : 1905170281
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 06 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : Pertama dari Empat Bersaudara
Alamat : Jl. Turi Gg. Taruna No. 57, Kel. Sudirejo I
No. Telephone : 08988010082
Email : daraanindyapратиwi@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Ramadhan
Nama Ibu : Misda Ariani
Alamat : Jl. Turi Gg. Taruna No. 57, Kel. Sudirejo I

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri No. 147/VIII Bogo Rejo
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 3 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Negeri 1 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Dara Anindya Pratiwi